

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kebijakan “Mayo Sekolah” yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo merupakan sebuah kebijakan yang diinisiasi untuk mengentaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo yang masih terbilang cukup banyak. Kebijakan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2022. Kebijakan “Mayo Sekolah” merupakan kebijakan yang memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak tidak sekolah yang bersedia kembali bersekolah dengan faktor ekonomi yang mendasarinya. “Mayo Sekolah” ini tidak hanya mengembalikan siswa kepada satuan pendidikan formal, namun juga kepada satuan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak yang diusahakan untuk kembali bersekolah. Upaya pemerintah tersebut menjadikan anak tidak sekolah di Kabupaten Wonosobo berkurang dari jumlah data yang terverifikasi tiap tahunnya.

Berdasarkan teori Edward III, dalam pengimplementasian program kebijakan “Mayo Sekolah” terdapat dua indikator yang tidak maksimal pelaksanaannya. Indikator tersebut yang pertama terdapat dalam variabel sumber daya, yaitu sumber daya fasilitas yang kurang. Setelah diteliti, ternyata terdapat satu faktor yang memengaruhi pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo, yaitu kurangnya satuan pendidikan pada jenjang SMA yang menimbulkan tidak terpenuhinya daya tampung siswa lulusan SMP di Kabupaten

Wonosobo tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan satuan pendidikan jenjang SMA ini tidak langsung menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kabupaten Wonosobo membutuhkan tambahan sekitar 5 sekolah SMA/ sederajat lagi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah ini. Hal tersebut didasarkan pada jumlah lulusan SMP yang tiap tahunnya tidak dapat melanjutkan pendidikannya yaitu berkisar pada 1500 siswa. Artinya, idealnya Kabupaten Wonosobo memiliki sekitar 52 hingga 55 SMA/ sederajat agar dapat menampung keseluruhan peserta pendidik yang telah lulus pada jenjang SMA.

Indikator selanjutnya yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” ini adalah terdapat pada SOP dan dasar kebijakan yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, belum terdapat SOP yang menjadi standar bagi sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, belum ada juga payung hukum atau dasar kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang program pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut menjadikan terbatasnya pelaksanaan yang dapat dilakukan, yaitu hanya dapat memberikan beasiswa kepada anak yang tidak bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) khusus tentang penanganan anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Dalam pelaksanaannya, program kebijakan “Mayo Sekolah” telah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Namun dalam pelaksanaannya, program kebijakan tersebut masih memiliki kesalahan yang serius.

Kesalahan tersebut diantaranya, kebijakan “Mayo Sekolah” ini sangat berfokus pada insentif finansial yang dapat diterima oleh para ATS sehingga faktor lain yang menjadi penyebab adanya ATS tidak terpikirkan dan tertangani dengan baik. Selain itu, data ATS tiap tahun yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berbeda dan tidak bisa dipastikan, sehingga tidak adanya data yang valid tersebut menyebabkan kebijakan ini tidak dapat diukur dan dianalisis keberhasilan atau perkembangannya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak terserapnya anggaran secara maksimal terhadap kebijakan “Mayo Sekolah”, anggaran yang tidak terserap dengan maksimal ini menjadi tanda bahwa kebijakan perlu ditinjau kembali oleh pembuat kebijakan, baik dari segi kejelasan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta dari regulasi pendukungnya.

Program “Mayo Sekolah” ini secara keseluruhan telah memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo khususnya adanya pengurangan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada tiap tahunnya. Pada tahun 2022, ATS terverifikasi oleh Disdikpora berjumlah 1.459 dan tertangani berjumlah 228 siswa. Selanjutnya pada tahun 2023 Disdikpora menggunakan data yang berbeda dan memverifikasi jumlah ATS adalah 1.938 dan hanya tertangani 80 siswa. Pada tahun 2024 ini, Disdikpora memverifikasi terdapat 5.938 ATS dan hanya tertangani sebanyak 418. Hal tersebut menunjukkan bahwa ATS yang tertangani pada tiap tahunnya tidak lebih dari 16%. Terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan dari segi data yang valid, segi hukum, sumber daya, serta SOP agar pelaksanaan kebijakan “Mayo Sekolah” ini dapat lebih efektif dan terstruktur. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah direncanakan

dan bahkan dilakukan, jika titik atau duduk permasalahan yang diangkat tidak jelas, maka akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang tidak baik dan efektif.

Tentunya penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya waktu saat penelitian sehingga masih belum dapat menggali lebih dalam dari aspek penerima manfaat dan sasaran kebijakan. Hal tersebut diharapkan kedepannya dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait program kebijakan “Mayo Sekolah”, yaitu:

1. Perlunya peninjauan ulang kebijakan baik dari segi duduk masalah yang jelas, kevalidan data yang digunakan, perencanaan dengan target yang jelas dan teknis yang memadai, indikator keberhasilan yang konkrit, serta payung hukum yang kuat agar pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” lebih efektif dan tepat sasaran, serta dapat diukur dan dianalisis keberhasilannya.
2. Perlunya sinergitas dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terkait pengadaan fasilitas seperti gedung satuan pendidikan terutama jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat agar dapat menambah daya tampung dan menerima keseluruhan siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Wonosobo untuk mengurangi angka anak tidak sekolah pada jenjang tersebut.
3. Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan program kebijakan “Mayo Sekolah” agar dalam struktur birokrasi yang telah ada, SOP

dapat menjadi sebuah panduan untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman dan arah jalan kerja program “Mayo Sekolah”.

4. Membuat kebijakan atau program yang tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi dan insentif finansial (pemberian beasiswa), namun juga membuat program yang memotivasi anak-anak untuk bersekolah, karena masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ditemukan dan tidak bersedia kembali ke sekolah dikarenakan tidak adanya motivasi di dalam diri mereka.
5. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam topik serta fokus pada aspek yang belum dibahas secara mendalam, menambahkan perspektif dari sasaran program dan masyarakat, atau juga dapat menganalisis program kebijakan yang sama setelah Rencana Aksi Daerah (RAD) disahkan.